

LANGGAR DISIPLIN BERAT

Bupati Beri Sanksi Tiga ASN, 1 Dipecat

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta kembali menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Pemberian sanksi terhadap Ketiga oknum ASN tersebut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Dari tiga oknum ASN tersebut satu diantaranya diberhentikan tidak atas permintaan sendiri (dipecat) karena pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori berat.

Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan tiga oknum ASN yang dikaji sanksi bupati ini tersandung kasus yang

berbeda. Seorang ASN berinisial SY yang merupakan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika beberapa bulan lalu digerebek di salah satu losmen atau penginapan di pesisir selatan bersama dengan seorang perempuan bukan istrinya. Atas kasus tersebut, SY kemudian dijatuhi hukuman sedang yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. "Satu lagi diberhentikan tidak atas permintaan sendiri yakni SA aparaturnya



KR-Bambang Purwanto
Bupati Gunungkidul H Sunaryanta.

sipil negara di dispar," imbuhnya. Kemudian yang ketiga adalah DS dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terbukti melakukan pungutan meminta 1 OB (orang/ perbulan) honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat masing-masing Kalurahan melalui Koordinator Jogoboyo pada saat Pemilihan Umum Tahun 2024, oknum ASN berinisial DS kemudian dipindah tugaskan ke Kapanewon Karangmojo dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut serelah sebelumnya melalui pemeriksaan oleh dari tim dari OPD terkait, hingga melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. "Hingga pada akhirnya dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang.

(Bmp)

BANGKAI SUDAH MULAI MEMBUSUK

Penyu Lekang Mati Terdampar di Pantai

TEMON (KR) - Pemandang menemukan seekor penyu jenis lelang terdampar dalam kondisi mati di sekitar Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo, Selasa (2/9).

Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah V Kulonprogo, Aris Widyatmoko mengatakan, saat ditemukan kondisi sawa berstatus rentan punah tersebut sudah mulai membusuk.

"Bangkai penyu ditemukan seorang pemancing di area pantai sisi selatan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sekitar pukul 08.00 WIB," kata Aris. Selanjutnya dilaporkan



KR-Istimewa

Petugas SAR mengubur bangkai penyu lelang di Pantai Glagah, Temon.

ke personil SRI Wilayah V Kulonprogo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui penyu berjenis kelamin betina dengan panjang sekitar 80 cm dan lebar 55 cm.

"Kondisinya, cangkang

sudah membusuk dan bangkai mengeluarkan semacam jeroan. Berkaitan penyebab kematian belum diketahui secara pasti," tuturnya.

Petugas sudah mengubur bangkai tersebut di sekitar

lokasi awal penemuan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya bau yang muncul akibat bangkai penyu tersebut. "Setelah selesai diukur, bangkainya langsung kami kubur," ungkap Aris.

Penemuan tersebut menambah daftar panjang kasus temuan penyu lelang yang mati terdampar di kawasan pantai Kabupaten Kulonprogo. Beberapa waktu lalu, penyu jenis sama juga ditemukan sudah mati di sekitar Pos Polairud Pantai Glagah.

"Kalau dihitung, tahun ini sudah ada lima kasus penemuan bangkai penyu Lelang," ungkapnya.

(Rul)

DLH GELAR KONSULTASI PUBLIK I

Penyusunan KLHS RPJMD Bersifat Partisipatif

WATES (KR) - Pembangunan di Kulonprogo saat ini semakin massif dan akan banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pengendalian lingkungan dapat diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan.

"Integrasi KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah langkah penting untuk memastikan aspek lingkungan hidup menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah jangka menengah," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulonprogo, Ir Gusdi Hartono MT saat membuka Konsultasi Publik I KLHS RPJMD Kabupaten Kulonprogo, di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum PKP setempat, Kamis (29/8).

Hadir Asda 2 Setda Kulonprogo Bambang Tri Budi Harsono MM, Tim Penyusun dan Tenaga Ahli dari CV Madani Callysta Saibuyun, Priyo Akuntomo dan Tim Ahli Validasi KLHS DLHK DIY Dr Yuningtyas Setyawati. Saat ini Pembak Kulonprogo sedang penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD oleh Bappeda dan KLHS RPJMD oleh DLH.

Penyusunan KLHS RPJMD harus bersifat partisipatif dan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan penyusunannya Konsultasi Publik I melibatkan unsur masyarakat,



KR-Asrul Sani

Kepala DLH Ir Gusdi Hartono MT (tengah) dan Bambang Tri Budi H MM (dua kanan) saat Konsultasi Publik I KLHS RPJMD di Aula DPUP-KP setempat.

filantropi, akademisi dan stakeholder lain.

"Tujuan Konsultasi Publik I antara lain pembahasan kondisi umum wilayah, analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan isu pembangunan berkelanjutan," jelas Gusdi Hartono.

Gusdi berharap peran aktif OPD dan stakeholder lain meningkatkan capaian indikator pembangunan berkelanjutan dan sumbangsih pemikirannya untuk rencana pembangunan Kulonprogo 2025-2029 mendatang.

"Supaya rencana pembangunan dilaksanakan berprinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu diperlukan sinergitas Bappeda dan DLH agar dokumen RPJMD dan KLHS RPJMD akuntabel," jelasnya.

KLHS salah satu instrumen untuk memastikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada ting-

katan pengambilan keputusan bersifat strategis pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan (RPP).

Asda 2 Setda Kulonprogo Bambang Tri Budi Harsono MM menegaskan KLHS bagian tak terpisahkan dari dokumen RPJMD. Dinamika perkembangan pembangunan seiring adanya YIA, kawasan penyangga KSPN Borobudur, Aertropolis dan kawasan peruntukan industri akan berdampak pada kondisi lingkungan. Sehingga akan terjadi alih fungsi lahan pertanian.

"Seuai UU No 32/2009 tentang PPLH, pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan jadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD," tegas Bambang Tri. (Rul)

PELATIHAN DAN PENYERAHAN ALAT PENGOLAH SINGKONG

Dukung Kawasan Wisata, Gunakan Teknologi Zero Waste

KALIBAWANG (KR) - Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditandai penyerahan alat pengolah singkong di Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kulonprogo, Sabtu (31/8). "Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan singkong melalui teknologi zero waste dengan fokus pada pengembangan produk kuliner dan oleh-oleh khas," kata Ketua PKM Yunda Maymanah Rahmadewi STP MSc dari Program Studi Bisnis Jasa Makanan Diploma 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Senin (2/9).

PKM beranggotakan Cita Eri Ayuningtyas SGz MPH dan Susianti, SE MSc dari Program Studi Bina Wisata Politeknik API Yogyakarta. Dijelaskan Yunda Maimanah, penyerahan alat pengolahan singkong dan bahan singkong sebagai bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) kepada masyarakat Kalurahan Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo.

Teknologi/Metode Zero Waste adalah gaya hidup yang bertujuan untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan.

Selain penyetahan alat pengolah singkong, rangkaian kegiatan yang telah terlaksana di antaranya Pelatihan Keamanan Pangan, Pembuatan Tepung Singkong, Pembuatan Produk Olahan dari Tepung Singkong seperti kastengel singkong, almond crispy singkong, kue kering singkong kacang, dan cake kukus singkong, Pengemasan dan Labeling Produk, Pembuatan Kompos dari Kulit Singkong, serta Penentuan Harga dan Manajemen Pemasaran.

Sebagai hasil dari pelatihan dan pendampingan dengan dukungan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, produk-produk olahan singkong seperti kastengel singkong, almond crispy singkong, dan kue kering singkong kacang telah di-



KR - Istimewa

Cita Eri Ayuningtyas (Ketua Tim Pelaksana PKM) menyerahkan alat pengolah singkong kepada Susanto (Lurah Banjarharjo).

pamerkan. Produk-produk ini diharapkan dapat menjadi oleh-oleh khas yang dapat mendukung pengembangan kawasan wisata di Kalurahan Banjarharjo, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sedangkan Suwandi, Carik (Sekretaris) Kalurahan Banjarharjo mengungkapkan, mengapresiasi inisiatif ini. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah singkong secara efektif, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru "Kami percaya produk olahan singkong ini akan men-

jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Banjarharjo," ucapnya.

Sri Lestari, salah satu peserta pelatihan menambahkan, pelatihan ini sangat bermanfaat. "Kami belajar banyak tentang teknik pengolahan singkong yang efisien dan ramah lingkungan. Produk-produk yang kami buat sangat lezat dan tentunya akan menarik perhatian konsumen. Kami merasa lebih siap untuk memasarkan produk kami dan berharap ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga kami." katanya.

(Wid).

Peran Green Finance Pada Isu Lingkungan dan Keberlanjutan (Telaah Riset Empiris)



Reza Widhar Pahlevi, SE MM CSA
Dosen Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta

SEIRING meningkatnya masalah pencemaran lingkungan dan kebutuhan mendesak akan pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan telah muncul sebagai titik fokus pengembangan penelitian dan arah kebijakan pemerintah (Zhang & Yan,

2023). Istilah Green finance merupakan konsep keuangan hijau yang bertujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan produk serta layanan keuangan yang mendorong investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama konsep green finance adalah pengeluaran modal untuk proyek atau pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Green finance merupakan sebuah pendekatan strategis untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi (Dziejarski et al., 2023; Hassan, 2017). Diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang

mekanisme pendanaan hijau dan korelasinya dengan pertumbuhan berkelanjutan sangat penting untuk secara efektif mengatasi berbagai masalah di seluruh dunia seperti pemanasan global, terbatasnya sumber daya, dan ketidakadilan sosial. Green finance merekomendasikan pengintegrasian aktivitas keuangan dengan praktik yang berkelanjutan secara ekologis. Berbeda dengan operasi keuangan konvensional.Green finance mengutamakan manfaat ekologis dan sangat berfokus pada industri pelestarian lingkungan (Mamun et al., 2022; Lee et al., 2017). Sasaran utama pembangunan berkelanjutan, yang diakui secara universal, adalah pelestarian ekologis

dan kemajuan ekonomi. Penekanan harus diberikan pada pemanfaatan instrumen keuangan untuk mendorong terciptanya ekosistem yang sehat secara ekologis, memastikan kepatuhan terhadap norma ekologis yang ditetapkan, dan penggunaan aset yang efisien.

Pentingnya Green finance dalam mendorong pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketika negara-negara di seluruh dunia berupaya untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran keuangan dalam memfasilitasi transisi ini menjadi semakin penting

(Alharbi et al., 2023). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama mempertimbangkan konsep keuangan hijau untuk aliran dana pembangunan berkelanjutan. Beberapa negara maju telah menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi emisi dan polusi, serta pengembangan Green Finance. Namun, efektivitas inisiatif Green Finance bergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas lembaga (Hossin et al., 2023; Sharma et al., 2022). Kualitas kelembagaan, yang mencakup struktur tata kelola, kerangka peraturan, dan undang-undang, membentuk lingkungan yang memungkinkan Green Finance diimplementasikan (Zhao et al., 2024) sekaligus

mempengaruhi kepercayaan investor, persepsi risiko, dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Demikian pula, kelimpahan dan aksesibilitas sumber energi terbarukan memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan dan skalabilitas proyek hijau sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan (Degbedji et al., 2024).

Mengacu pada priority theory of sustainable finance, prioritas harus diberikan kepada proyek-proyek tersebut saat melakukan investasi bisnis yang dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan (Bai et al., 2022) yang berarti bahwa aktivitas keuangan harus dihubungkan dengan keberlanjutan. Lebih lanjut,



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

bahwa saat membuat keputusan investasi, prioritas harus diberikan kepada pertanian berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan sektor-sektor relevan lainnya yang membantu mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori tersebut mendukung pengarah positif keuangan hijau terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Green Finance mengutamakan untuk mengendalikan risiko ekologis secara efisien dan mencapai keseimbangan yang wajar antara aset ekologis dan keuangan.***